

RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN IRIGASI: STUDI KASUS DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

(Conflict Resolution of Irrigation Development: Case Study in Ibu subdistrict of West Halmahera District)

Budi Sahabu*), Saharuddin, dan Lala M. Kolopaking

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

*E-mail: budhypilas@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objective of this research is to understand the conflict resolution of dam and irrigation development in three subdistrict villages of Ibu Halmahera Barat district 2013. This research uses analysis of dispute style (AGATA) in the form of: avoidance, accommodating, compromise, competitive, and collaboration. The results showed that there are two styles of conflict that is avoid and competitive style. Both style of disputes are transformed into a compromise style after the opposing party offers negotiation of land compensation. Based on this it can reduce the two parties, so that the mediator easily deal with the conflict. The settlement path is through mediation and facilitation by bringing the two conflicting parties together with the mediator of West Halmahera people's parliament. The decision taken is to stop the construction of dam and irrigation channels under construction. The decision, in addition to reducing the escalation of tensions, also to anticipates violet conflict between the two parties (the pros and cons of development).

Keyword: Conflict resolution, irrigation development, dispute style

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami resolusi konflik pembangunan bendung dan irigasi di tiga desa kecamatan Ibu kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis gaya bersengketa (AGATA) yang berupa: saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif, dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua gaya berkonflik yaitu gaya menghindar dan kompotisi. Kedua gaya bersengketa tersebut berubah menjadi gaya berkompromi setelah pihak lawan (kontra) menawarkan negosiasi ganti rugi lahan. Berdasarkan hal tersebut dapat mengurangi eskalasi ketegangan antar kedua belah pihak, sehingga pihak mediator dengan mudah menangani konflik. Jalur penyelesaian yang ditempuh yaitu melalui mediasi dan fasilitasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru dengan mediator pihak dewan perwakilan rakyat daerah Halmahera Barat. Keputusan yang diambil adalah memberhentikan proyek pembangunan bendung dan saluran irigasi yang sedang dibangun. Keputusan tersebut, selain mengurangi eskalasi ketegangan juga mengantisipasi terjadinya konflik kekerasan antar kedua belah pihak (pihak pro dan kontra pembangunan).

Kata kunci: Resolusi konflik, pembangunan irigasi, gaya bersengketa

PENDAHULUAN

Masyarakat, menurut Dahrendrof (1959, 1968) memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik (Ritzer 2012). Dahrendrof pun menjelaskan yang dikutip McQuarie (1995) dalam Susan (2010) bahwa wajah masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Kemudian, Engel dan Korf (2005) dikutip Kinseng (2013) konflik dapat muncul secara gradual, atau berkembang secara cepat sebagai respon terhadap beberapa kejadian yang penting. Ketika perbedaan meningkat dan semakin intensif, konflik laten akan berubah menjadi *manifes*. Konflik manifes ini mungkin akan berkembang dan mengalami eskalasi sehingga mencapai tahap konflik kekerasan (Kinseng 2013).

Wani (2011) mengatakan ...“*Conflict*” is term used to mean a variety of things, in an assortment of contexts under the mantle of conflict are words such as, serious disagreement, incompatibilities, fight, argue, contest, debate, combat, clash and war etc...”. Fisher et al (2001) dikutip Kinseng (2013) membagi tahapan konflik menjadi lima tahap, yakni:

prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik. *Prakonflik* merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga akan menimbulkan konflik. *Konfrontasi* merupakan periode dimana konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. *Krisis* merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dan, *pascakonflik*; pada periode ini konflik diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, pihak ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik (Nikijuluw et al (2013).

Pasya & Sirait (2011) menjelaskan bahwa konflik laten adalah sebuah kondisi yang kerap kali menjadi ciri utama, dan berkemungkinan besar setiap saat bisa meledak tidak terkendali. Sebagaimana dijelaskan juga Wani (2011) bahwa konflik adalah kondisi yang oposisi atau antagonism, yang berasal dari tempat yang berbeda, berbeda sumber, dengan berbagai alasan yang

bervariasi dan dalam berbagai bentuk seperti; konflik pribadi, konflik rasial, konflik kelas, konflik politik, konflik komunal dan non-komunal, konflik kekerasan dan non-kekerasan, konflik budaya, konflik agama, konflik nilai dan konflik kepentingan, konflik sosial, konflik ekonomi dan konflik ideologi.

Konflik yang hendak dilihat adalah konflik pembangunan irigasi yang dibangun pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten) pada tahun 2013.

Di era Jokowi-JK terdapat sembilan agenda prioritas (Nawa Cita). Agenda yang ke tujuh berbunyi: *kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta ha sawah baru di luar Jawa. Kami akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga* (Talan 2015). Dikatakan Talan (2015) pelaksanaan kebijakan ini dapat memicu konflik air, bila tidak mempertimbangkan atau merubah cara-cara yang selama ini dipraktikkan oleh institusi pelaksana pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Beranjak uraian di atas, kontroversi ataupun konflik pembangunan kerap terjadi diberbagai tempat (daerah) di Indonesia, sehingga diperlukan metode penanganan konflik (resolusi konflik) secara tepat. Dalam konteks tersebut, konflik menjadi penting untuk diungkap dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik.

Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa pembangunan bendung dan irigasi menyebabkan konflik antar pihak? dan bagaimana proses resolusi konflik pembangunan irigasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penting untuk diketahui: (1) latar belakang gagasan pembangunan irigasi; (2) sumber-sumber konflik dan arena konflik; (3) analisis gaya bersengketa (AGATA), dan (4) resolusi konflik. Dengan mengetahui keempat hal tersebut, maka diperoleh informasi tentang konflik dan resolusi konflik. Studi ini hendak menampakan atau mengungkap permasalahan yang terjadi di tiga desa serta memberikan rekomendasi pengetahuan dalam penyelesaian konflik (resolusi konflik) baik di Halmahera Barat(khususnya), dan Indonesia pada umumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan dan menguraikan konflik antar pihak serta analisis resolusi konfliknya. Paradigma yang dipakai yaitu paradigma konstruktivisme. Pilihan atas paradigma ini disebabkan karena apa yang disebut sebagai realitas sosial padadarnya merupakan hasil intersubektivitas atau kesepakatan antara-subyek. Sebagaimana dijelaskan Ritzer (2007) paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Adapun penelitian ini dilakukan di tiga desa (Tahafo, Togola Sangir, dan Togola Wayoli) Maluku Utara. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan menggunakan teknik *snowball* yaitu menelusuri informasi hingga terjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Informan terdiri dari; tokoh adat, agama, pemuda, pak kades, masyarakat pemilik lahan, dan pihak PU Propinsi. Metode analisis; tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembangunan Bendung dan Irigasi

Seiring dengan perkembangan jaman, irigasi di Indonesia kemudian berkembang hingga memasuki periode jaman penjajahan Belanda, tercatat dibangun sekitar tahun 1852 (Mawardi dan Memed 2006). Dijelaskan Vlughter (1949) dalam Pasandaran (2007) di era kolonial komitmen pemerintah dalam membangun irigasi mulai muncul yaitu takala terjadi kelaparan besar yang menyebabkan kematian sekitar 200 ribu orang sebagai akibat musim kemarau yang terik dan panjang tahun 1848 di Kabupaten Demak Jawa tengah. Setelah itulah, dilakukan pembangunan bendung di berbagai tempat seperti bendung Gelapan, Tuntang, dan Sidoarjo di delta Brantas.

Semakin meluasnya irigasi yang dibangun pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Republik Indonesia dijumpai dikotomi kerangka pengelolaan irigasi yang berbasis



Gambar 1. Lokasi Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi Persawahan. Sumber: Survei dan Hasil Wawancara Maret-April 2016

masyarakat tani dan pemerintah. Ada empat fase perkembangan yang saling mempengaruhi antara kekuatan-kekuatan yang menentukan eksistensi kedua kerangka pengelolaan.

Pertama, fase pembangunan irigasi oleh masyarakat tani. Akumulasi pengalaman masyarakat tani terjadi dalam tempo yang lama mungkin ribuan tahun seperti yang dilaporkan oleh Van Zetten Vander Meer (1979), yang telah berlangsung sejak 16 abad SM, dimulai dari pembangunan sawah tadah hujan hingga ditemuinya teknologi mengalihkan air dari sungai.

Fase kedua, koeksistensi antara irigasi masyarakat dan pemerintah. Sejak pertengahan abad 19 irigasi dalam skala besar dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari satu abad (1848 –tujuh puluhan). Walaupun masyarakat tani tetap melanjutkan pengembangan sistem irigasi mereka sendiri.

Ketiga, dominasi peranan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Investasi irigasi dilakukan secara besar-besaran pada dasawarsa 70-an dan 80-an dengan tujuan mewujudkan tercapainya swasembada beras. Adanya teknologi revolusi hijau yang responsif terhadap air memerlukan upaya perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah ada dan perluasan sistem irigasi khususnya di luar Jawa. Upaya tersebut sangat ditunjang oleh melonjaknya harga minyak dipasar internasional yang memperkuat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan utang luar negeri yang dalam tahap awal dilakukan melalui proyek irigasi dengan bantuan IBRD/IDA. Dan, *keempat*, fase reformasi pengelolaan irigasi dan sumberdaya air pada umumnya seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah (Pasandaran 2003 dalam Pasandaran 2007). Selama kurun waktu lima dasawarsa antara tahun 1950-2000 luas irigasi Indonesia hanya meningkat sekitar 50 persen dari 3,5 juta ha pada tahun 1950 menjadi 5,2 juta ha pada tahun 2000 sedangkan pada kurun waktu yang sama irigasi di dunia meningkat lebih dari tiga kali lipat yaitu dari 80 juta ha pada tahun 1950 menjadi 270 juta ha pada tahun 2000 (Pasandaran 2007).

Dalam PUSDATA (2014) Irigasi adalah salah satu infrastruktur SDA yang berperan penting dalam mendukung pangan nasional (PUSDATA 2014). Dijelaskan Pasandaran (2007) bahwa pembangunan irigasi sebagai respons terhadap masalah kelaparan dan kemiskinan di pulau Jawa dan memperbaiki ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pribumi (Indonesia).

Proyek pembangunan irigasi persawahan direalisasi pada tahun 2013. Sebelumnya survei lokasi pembangunan dilakukandi 2006, yang kemudian disosialisasikan tahun 2007. Proyek ini bersumber dari PT NK yang bergerak dalam bidang konstruk, namun perusahaan tersebut tidak secara langsung terjun kelapangan, melainkan pihak kedua untuk menghendel proyek tersebut, pihak tersebut membangun berkerjasama dengan pihak pemerintah PU Propinsi Maluku Utara dan pemerintah Halmahera Barat hingga ke tingkat desa (kepala desa).

Bendung dirancang dengan ketinggian kurang lebih 7 m dengan panjang ± 150 m, dan lebarnya ± 5 m. Sementara, irigasi ditargetkan ± 20 km atau setara dengan 20.000 meter. Jalur irigasi dilintasi tiga titik yaitu jalur ke selatan, barat, dan utara. Jalur selatan mengarah pada kawasan perbatasan antara desa Togola Wayoli dan Sarau (IbuTengah dan Selatan), jalur utara masuk pada wilayah masyarakat Tahafo dan Togola Sangir, sementara jalur barat (arah pantai) berada dalam kawasan sagu (lahan sagu) yang bakal dijadikan sebagai areal persawahan

seluas 1000 Ha.

Warga yang dilibatkan dalam pembangunan irigasi adalah masyarakat Togola Wayoli, yang dipekerjakan sebagai tenaga pembantu (*kenek*) dengan upah Rp 5000,00 perjamnya, dari awal pembongkaran hingga pada tahap penyelesaian pembangunan fisik, baik itu pembuatan bendung, irigasi maupun pembongkaran lahan. Selain dipekerjakan, tanaman warga yang terkena jalur irigasi, pemerintah turut menggantikannya berupa uang (ganti rugi lahan/tanaman) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Halmahera Barat, dan terkadang dibayar lebih dari itu. Sementara desa Tahafo dan Togola Sangir tidak mengetahui hal tersebut, masyarakat dua desa ini mengetahui setelah berpergian ke kebun mereka dan melihat sungai dan dusun kelapa mereka tergusur, sehingga pada tahap pembuatan Sabtu 2 Maret 2013, terjadi kontroversi (pro dan kontra) dengan masyarakat dua desa (Tahafo dan Togola Sangir).

Pembangunan irigasi dilatarbelakangi dengan adanya sumber agraria yang mendukung, masalah pekerjaan, dan bakal dijadikan sebagai mata pencaharian utama di daerah tersebut. Selain itu masyarakat Togola Wayoli pun berkeinginan beralih profesi dari petani kelapa ke petani padi sawah, dengan dihidirkannya pembangunan irigasi dipercaya masyarakat dapat mengembangkan lahan mereka lebih baik lagi. Areal lahan sawah yang dibangun dipercayakan kepada masyarakat Togola Wayoli untuk mengelolanya.

Sumber Konflik dan Arena Konflik Pembangunan

Menurut Dahrendorf (1963) sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan atau otoritas. Selanjutnya, Dahrendorf berpandangan bahwa ada kecenderungan yang melekat pada masyarakat untuk berkonflik; karena mereka yang memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak miliki kekuasaan juga mengejar kepentingannya (Kinseng 2013). Konflik pembangunan irigasi erat dengan masalah lahan (sumber agraria) karena pembangunan tidak terlepas dengan lahan. Olehnya itu, masalah pembangunan adalah masalah lahan (sumber agraria), sebagaimana ditemui dalam lokasi penelitian ini. Ditemui sumber kemunculan konflik antar pihak karena terdapat klaim-klaim atas sumber agraria di tiga desa.

1) Tahap awal sosialisasi lokasi pembangunan

Tahap awal sosialisasi menjadi satu pemicu konflik antar pihak yang didalamnya mencakup ketidakterlibatan masyarakat dua desa dalam pembangunan; *pertama*; rencana program pembangunan bendung dan irigasi persawahan tidak diketahui masyarakat dua desa yang sesungguhnya juga memiliki hak dalam lokasi pembangunan. Hal itu membuat mereka merasa tersisih dari tempat tinggal sendiri. Dan, *kedua*; keperpihakan pemerintah kepada masyarakat Togola Wayoli, baik dari sisi informasi maupun dalam mengembangkan perekonomian desa.

2) Cara pandang masyarakat terhadap pembangunan

Masyarakat dari desa Tahafo dan Togola Sangir, menghendaki pembangunan dapat bernilai positif (tidak mengeksploitasi sumber daya alam) dan dapat menjaga nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Timbulnya kontroversi dalam masyarakat tiga desa disebabkan adanya perbedaan kepentingan dengan berbagai alasan yang dilontarkan antar kedua pihak.

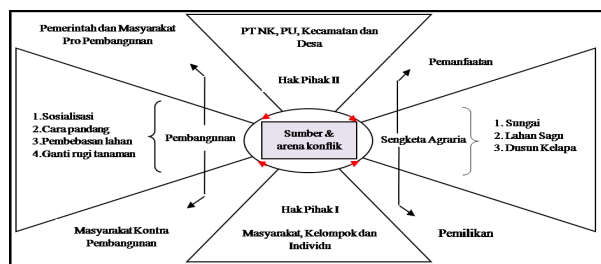
Alasan dari pihak pro pembangunan (masyarakat Togola Wayoli): *pertama*; telah berpengalaman bercocok tanam padi ladang dan

sawah sebelumnya pada tahun 2007 yang memanfaatkan anak sungai (sungai *sasur* namanya) sebagai sarana pengembangan, namun air tersebut tidak berfungsi secara baik saat disalurkan ke persawahan. *Kedua*; masyarakat setempat melihat sumber agraria terutama lahan sagu dapat menambah perekonomian jika dikonversi menjadi lahan sawah. Dan, *ketiga*; beralih profesi pekerjaan dari petani kelapa ke petani sawah. Mengingat harga kopra yang tak kunjung pasti dan tenaga kerja yang sudah mulai berkurang membuat masyarakat Togola Wayoli memilih untuk beralih profesi menjadi petani padi sawah. Masyarakat Wayoli percaya petani padi sawah dapat menjamin perekonomian mereka baik dalam keluarga maupun desa setempat. Sehingga dengan adanya program pembangunan irigasi sangat terbantu.

Tabel 1. Posisi Konflik Antar Pihak

Posisi Konflik	Posisi Pihak Berkonflik	Objek yang Dipersengketakan	
		Pembangunan Bendung dan Irigasi	Sumber Agraria
Vertikal	Pemerintah vs Pihak Kontra	1. Tahap Awal Sosialisasi	1. Pembebasan Lahan/Konversi Lahan Sagu Menjadi Lahan Sawah
		2. Cara Pandang	2. Legitimasi Sejarah dan Kebijakan (UU & PP)
		3. Ganti Rugi Lahan	
Horizontal	Pihak Pro vs Pihak Kontra	1. Cara Pandang	1. Pengklaim atas Sumber Agraria
		2. Penolakan Pembangunan	2. Pemanfaatan Sumber Agraria

Sementara pihak kontra pembangunan (masyarakat Tahafo dan Togola Sangir); *pertama* adalah pengadaan bendung di sungai Tahafo. Hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat nelayan tangkap karena masyarakat setempat menjadikan sungaisebagai tempat bersandar perahu (parkiran perahu) dan juga tempat transaksi antara nelayan dengan warga penjual ikan asap (*dibo-dibo*). *Kedua*; pembangunan irigasi kurang lebih 20 km, dikatakan, selain menumbang tanaman kelapa juga berpengaruh pada kesuburan tanaman kelapa dan berefek pada pendapatan warga. Dan, *ketiga*; adanya perluasan persawahan di areal lahan sagu kecamatan Ibu kabupaten Halmahera Barat, khususnya yang ada di tiga desa, kurang lebih 1000 ha. Hal ini, dianggap mengancam para petani sagu, jika lahan sagu dijadikan sebagai lahan sawa, maka hilangnya mata pencaharian dan juga makanan lokal masyarakat setempat.



Gambar 2. Sumber Konflik dan Arena Konflik Pembangunan Irigasi 2013

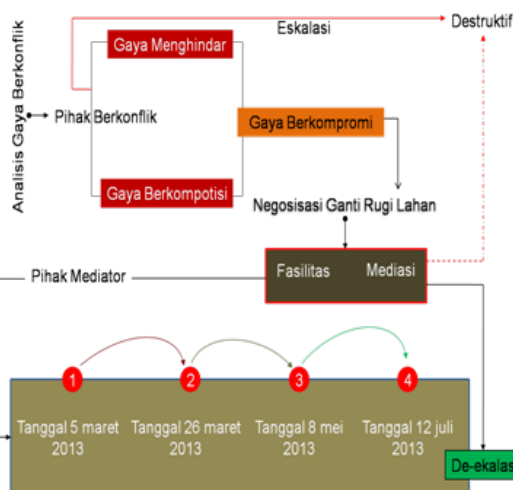
3) Penolakan terhadap pembebasan sumber agraria di kawasan pembangunan

Selain masyarakat Tahafo dan Togola Sangir yang menggelar penolakan terhadap pembebasan lahan atau pengurusan lahan, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Tahafo (HIPMAFO) juga mendukung dan menggelar aksi bersama dengan masyarakat. Ada beberapa tahapan yang dibuat dalam gerakan tersebut, namun dari gerakan itu ada yang tidak berhasil dilakukan, seperti gerakan pembakaran barak dan alat berat di lokasi pembangunan, dan juga mengusir pihak pekerja termasuk masyarakat Togola Wayoli yang bersebrangan dengan mereka. Gerakan yang berhasil yaitu gerakan penyebaran isu dengan menggelar aksi kampanye di beberapa titik, diantaranya; desa Togola Wayoli, desa Tongute Ternate, dan desa Gam Ici.

4) Ganti rugi lahan/tanaman

Tuntutan saat itu berkisar dari 20 hingga 50 juta per pohon (kelapa, sagu, dan tanaman lainnya) terhitung dari pohon, buah hingga tanahnya. Mereka mengkalkulasi satu pohon kelapa dapat mencapai 10-40 bibit pohon dan itu perlu diperhitungkan, begitu pun dengan pohon pala. Sedangkan pohon sagu terhitung dari nilai-nilai yang teranut dalam kehidupan masyarakat setempat yang tak bisa dihilangkan, seperti; tradisi *dodengo*, *papeda* (makan lokal) serta manfaat lainnya. Munculnya tuntutan itu berawal dari; 1) pengurusan lahan secara paksa (dilakukan secara diam-diam oleh pihak pelaksana pembangunan, dan, 2) merasa dirugikan, selain harta, waktu kerja pun terbuang.

Pihak yang mempermasalahkan pembangunan tersebut berasal dari desa Tahafo dan Togola Sangir. Masyarakat Tahafo mengklaim bahwa lahan yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan tersebut masuk dalam kawasan desa mereka dan memiliki sejarah panjang berdasarkan nenek moyang, sehingga pengklaim ini menjadi pertarungan dalam arena tersebut, yang masing-masing pihak mempertahankan lahan mereka berdasarkan legitimasi yang dianggap benar. Arena konflik dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar.3. Menuju Resolusi Konflik Pembangunan Irigasi

Analisis Gaya Bersengketa

Dijelaskan Pasya dan Sirait (2011) apabila gaya sengketa (setidaknya salah satu pihak) adalah agitasi (menyerang), maka ini dapat dikategorikan sebagai gaya destruktif. Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam kondisi ini: Pertama, para pihak ditawarkan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum formal

(litigasi); Kedua, mediator mengambil inisiatif melakukan upaya de-eskalasi (penurunan) tegangan persengketaan, melalui diplomasi setengah kamar (*shuttle diplomacy*) dan parsial kepada masing-masing pihak, mengajak para pihak secara persuasif untuk meninggalkan gaya agitasi destruktif, hingga mencapai suatu kondisi dimana gaya bersengketa mereka berubah ke gaya-gaya lain. Sama hal juga gaya kompetisi dan konstruksi. Apabila ditemui gaya bersengketanya adalah kolaborasi, maka penanganan penyelesaian melalui perundingan (negosiasi) dapat ditawarkan.

Apabila ditemui gaya bersengketanya adalah akomodasi, maka bentuk penanganan penyelesaian sengketa yang dapat ditawarkan yaitu mediasi atau fasilitasi. Memiliki dua implikasinya: Pertama, apabila pengorbannya adalah mutlak tanpa ada syarat dan tidak berdampak buruk pada pihak yang mau berkorban, maka yang ditawarkan adalah fasilitasi pertemuan/dialog; Kedua, apabila pengorbannya bersyarat atau setidaknya kelak akan berdampak tidak baik bagi salah satu pihak, terutama pihak yang berkorban, maka yang ditawarkan adalah sebuah proses mediasi, dimana mediator membantu para pihak melakukan analisis resiko dari sebuah pengorbanan yang akan diberikan. Apabila gaya bersengketa adalah kompromi, maka bentuk penanganan penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah fasilitasi. Kekhasan gaya ini adalah para pihak pengambil jalan tengah tanpa mempermasalahakan lagi siapa yang dimenangkan atau siapa yang dirugikan. Sementara gaya bersengketa yang menghindari merupakan gaya yang miskin *social capital* ataupun *multi-stakeholder capital*. Pada gaya ini, pihak tersebut tidak memiliki kepedulian atas kepentingannya dan kepentingan pihak lain. Apatis adalah ciri pihak yang memiliki gaya ini.

Ditemui dua posisi konflik dari awal mula masuk program pembangunan hingga timbulnya kontroversi yakni konflik vertikal (pemerintah vs masyarakat) dan horizontal (masyarakat vs masyarakat). Dua posisi konflik yang dimaksud dimana terjadi pertarungan antara masyarakat dengan pemerintah (vertikal) dan masyarakat dengan masyarakat (horizontal). Posisi konflik vertikal ditempati masyarakat (pihak kontra) dengan pemerintah, sementara posisi konflik horizontal ditempati para kalangan bawah yaitu masyarakat Tahafa-Togola Sangir dengan masyarakat Togola Wayoli. Posisi Konflik antar pihak ini seperti terlihat pada tabel 1.

Dari posisi pihak yang berkonflik tersebut menyebabkan ketegangan antar masyarakat di dalamnya yang memperebutkan sumber agraria, yang masing-masing pihak mempertahankan atas hak dan kewenangan mereka dalam kawasan desa. Hasim *et al* (2015) mengatakan berdasarkan penelitiannya di desa Pangumbahan, bahwa konflik menyebabkan ketegangan antara aktor dan konflik mengakibatkan warga berada dalam posisi yang tidak seimbang.

Hal ini juga terjadi di tiga desa yang masing-masing pihak yang berkonflik memiliki gaya berkonflik cenderung agitasi, menghindar, dan kompotisi. Gaya agitasi mengarah pada gerakan penyebaran isu-isu ditingkat bawah (masyarakat) bersifat mengajak untuk menolak pembangunan. Gerakan ini dibangun pihak kontra (masyarakat Tahafa, Togola Sangir, dan mahasiswa) untuk melawan pemerintah dan pihak pro pembangunan. Gaya menghindar terbangun dalam masyarakat dua desa (Tahafa dan Togola Sangir) yang menolak tawaran pemerintah saat mengajak bekerjasama dan memilih melawan pihak pemerintah. Sementara gaya kompotisi terdapat pertarungan kepentingan yang memperebut sumber agraria. Dari ketiga gaya sengketa tersebut meningkatkan ketegangan

antar pihak. Eskalasi ketegangan mulai menurun ketika pihak yang menolak menghentikan perlawanan dan meminta negosiasi ganti rugi lahan. Pilihan yang diambil pihak kontra tersebut telah merubah gaya bersengketa/berkonflik menjadi gaya akomodasi dan kompromi, sehingga perseteruan diselesaikan melalui mediasi dan fasilitasi.

Menuju Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik adalah upaya mengatasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Inisiatif ini bisa hadir dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher *et al* 2001 dalam Wulan *et al* 2004). Proses negosiasi secara spontan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan dari pihak yang memiliki niat bernegosiasi, namun terkadang gagal, dibutuhkan orang ketiga (pihak ketiga) untuk menanganinya (Wulan *et al* 2004).

Menurut Pasya dan Sirait (2011) hasil analisis gaya bersengketa dapat dipergunakan sebagai informasi penting dan mendasar tentang pilihan-pilihan penanganan konflik yang dapat ditawarkan oleh mediator kepada para pihak yang bersengketa. Sejalan dengan itu, pilihan atas penyelesaian konflik pembangunan irigasi yang ditempuh saat itu yakni mediasi dan fasilitasi karena ditemui gaya konfliknya adalah gaya berkompromi. Pihak mediasi dari pemerintah desa dan kecamatan yang juga konflik, sementara pihak yang memediator berasal dari dewan Halmahera Barat. Terdapat empat jenjang waktu penyelesaian konflik yang ditempuh pihak mediasi dan mediator, dimulai pada tanggal 5 dan 26 maret 2013 (pertemuan pertama dan kedua) yang dimediasi pemerintah setempat. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga dan empat yaitu pada tanggal 8 mei dan 12 juli 2013 yang dimediasi pemerintah kecamatan dan desa sekaligus dimediator dewan Halmahera Barat. Pertemuan ketiga dan empat ini adalah lanjutan dari “proyek” belum diselesaikan pemerintah kecamatan dan desa.

1) Pertemuan pertama bertempat di kantor pihak pelaksana pembangunan desa Togola Wayoli. Pemerintah kecamatan dan desa selain terlibat dalam konflik tersebut mereka pun berperan sebagai pihak mediasi yang mempertemukan pihak kontra pembangunan dengan pihak pelaksana pembangunan (PU Propinsi Maluku utara dan PT NK). Namun, pertemuan ini belum membuahkan hasil sebab apa yang diinginkan pihak kontra belum terpenuhi, yaitu ganti rugi lahan sesuai keinginan mereka tanpa menggunakan peraturan daerah, kemudian menghentikan pengurusan lahan (menghentikan pembangunan bendung dan irigasi). Pertemuan tersebut dilanjutkan pada pertemuan kedua yaitu pada tanggal 26 maret 2013.

2) Pertemuan kedua di *gedung perdamaian* desa Tongute Ternate. Namun, pertemuan tidak berlangsung lama karena pembahasan masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu penjelasan mengenai ganti rugi lahan berdasarkan peraturan daerah, sehingga pihak kontra memilih meninggalkan dan membatalkan pertemuan tersebut. Pemerintah kecamatan kemudian membangun komunikasi dengan tiga kepala desa mendiskusikan untuk mempertemukan kembali masyarakat yang berkonflik.

3) Tanggal 8 mei 2013. Pertemuan ketiga di kantor desa Togola Sangir. Pertemuan ini dihadiri dewan Halmahera Barat serta aparat kepolisian dan TNI. Pada pertemuan ketiga ini, pihak mediator memberikan kesempatan masing-masing pihak menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Walaupun sempat

terjadi tegang di antara mereka, namun dapat dikendalikan pihak mediator (dewan Halmahera Barat). Saat itu kedua belah pihak saling menjatuhkan pihak lawan mereka sehingga memunculkan ketegangan dalam pertemuan tersebut. dan mahasiswa. Pertemuan ketiga ini pun belum dapat diputuskan langkah-langkah yang diambil pihak mediator sehingga dibuat kembali pertemuan keempat.

4) Pertemuan keempat di gedung DPRD Halmahera Barat ruangan rapat para wakil rakyat. Pertemuan keempat dihadiri tiap-tiap perwakilan pihak yang terlibat dalam konflik, pihak konsultan atau PU Propinsi mewakili PT NK, diikuti pak Camat Ibu Tengah, tiga kepala desa, dan perwakilan dari masyarakat tiga desa. Pertemuan ini pihak konsultan atau PU Propinsi mendapat kesempatan dari mediator untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pembangunan serta penjelasan tentang UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Penjelasan ini dengan bermaksud agar masyarakat yang hadir memahami secara jelas tujuan dari pembangunan. Setelah mendengar semua penjelasan pihak mediator memutuskan menghentikan proyek irigasi dengan alasan analisis dampak lingkungan yang dipakai tidak memadai seharusnya memakai analisis AMDAL agar bisa mengetahui secara jelas dampak-dampak yang akan masyarakat alami, dengan begitu solusi yang ditawarkanpun dapat diketahui secara jelas.

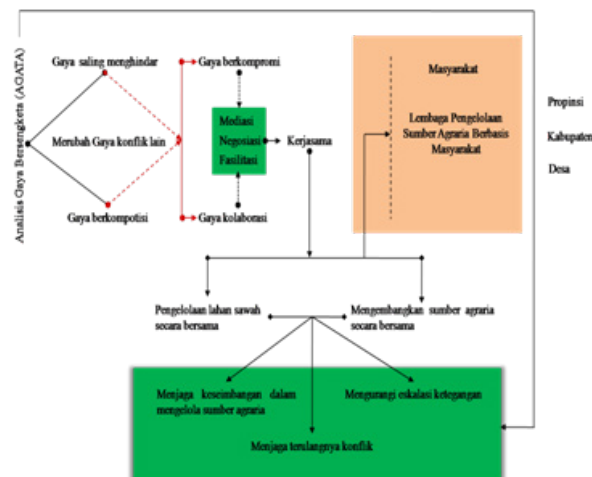
Keputusan yang diambil pihak mediator tersebut diterima kedua belah pihak terutama pihak kontra. Keputusan penghentian pembangunan irigasi dengan tujuan agar dapat mengurangi eskalasi ketegangan antar kedua belah pihak dan menjaga terjadi konflik kekerasan. Sementara pihak pelaksana pembangunan yang ditargetkan delapan bulan menyelesaikan bangunan irigasi dan perluasan areal persawahan tidak tercapai sesuai target yang diinginkan. Saluran irigasi yang ditargetkan 20 km yang terlaksana kurang lebih 1800 m, begitupun dengan perluasan areal persawahan, yang tadinya ditargetkan 1000 ha, yang terlaksana kurang lebih 115 ha. Menuju resolusi konflik terlampir pada gambar 3.

Resolusi Konflik Permanen

Resolusi konflik permanen adalah upaya penyelesaian sengketa dengan jalan damai dan pasti, artinya dapat dibuktikan secara nyata dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tawaran atas penyelesaian konflik diperlukan metode (cara) dan konsep(tawaran ide) yang baku dan mampu mempersatukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Konsep merupakan rancangan dalam mengatur strategi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat petani berdasarkan sumber konfliknya. Sumber agraria berupa; sagu, sungai, kelapa kopra, dan lain-lain yang menurut masyarakat penting untuk dikembangkan, sehingga dengan jalan ini dapat menciptakan keseimbangan dan terciptanya masyarakat yang mandiri.

Konsep yang ditawarkan yakni berupa pembentukan satu lembaga baru yang melibatkan masyarakat tiga desa tersebut yang mengatur dan mengelola sumber agraria secara bersama-sama. Nama lembaga yang ditawarkan adalah PSABM (Pengelolaan Sumber Agraria Berbasis Masyarakat) yang didalamnya mengatur masalah perizinan pembangunan dan juga pemanfaatan lahan. Lembaga ini dibentuk guna menjaga keseimbangan dalam mengelola sumber agraria, mengajaga eskalasi ketegangan, dan menjaga terulangnya konflik. Dan lembaga ini patut diakui oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan desa) untuk memandirikan masyarakat pedesaan. Tawaran atas resolusi konflik sebagaimana terlihat

pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar.4. Resolusi Konflik Permanen

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebab utama terjadinya konflik adalah tahap awal masuknya pembangunan yaitu tahap awal sosialisasi, yang tidak melibatkan masyarakat dua desa (Tahafo dan Togola Sangir) hingga merembek pada sengketa sumber agraria dan berakhir pada penuntutan ganti rugi lahan. Konflik antar pihak dalam pembangunan irigasi persawahan adalah konflik laten atau pra konflik, baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik diselesaikan melalui mediasi oleh pemerintah desa, kecamatan, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD Halmahera Barat).

Saran

1. Pemerintah lebih terbuka lagi saat mensosialisasi program yang direncanakan, baik itu bangunan irigasi, bendung, maupun bangunan fisik lainnya. Hal ini untuk menjaga terjadinya konflik antar pihak, sebab kemunculan konflik dapat bermula dari kesalahpahaman dalam memaknai suatu objek.
2. Jauh sebelumnya pemerintah telah mengidentifikasi dan mengenal lebih jauh struktur kepemilikan sumber agraria dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak dikalangan bawah (masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Hasim DH, Sahabu B, Asri M, Kusdiane SD, Sholiah FV. Konflik Pengelolaan Sumberdaya di Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 3/3, hlm. 101-105.
- Kinseng RA. 2013. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik. Di dalam Victor PHN, Lucky Adrianto, Nia Januarini [ed]. *Coral Governance*. Bogor (ID): IPB Press.
- Mawardi E, Memed M. 2006. *Desain Hidraulik: Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis*. Bandung: Alfabeta.
- Pasandaran E. 2007. *Pengelolaan Infrastruktur Irigasi Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vo. 5/2, hlm. 126-149.

- Pasya G, Sirait MT. 2011. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA): Panduan Ringkasan Untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: The Samdhana Institute.
- PUSDATA. Buku Informasi Statistik: Infrastruktur Pekerjaan Umum. 2014. [Internet]. [28 april 2017]. Download dari: http://www.publik/ind/produk/info_statistik
- Ritzer. G. 2007. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan N. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Talan JP. 2015. Masa Depan Tata Kelolah Air dan Tantangan Penyediaan Air Melalui Bendungan di Indonesia (Studi Kasus Konflik Pembangunan Embung di NTT). IRGSC Working Paper Series - WP 13 [www.irgsc.org] ISSN 2339-0638.
- Wani AH. 2011. *Understanding Conflict Resolution*. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 2.
- Wulan CY, Yasmi, Purba C, Wollenberg E. 2004. Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Jakarta: Center for International Research.